



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Alamat : Jl. AW. SUMARMO NO. 46 B Telp. (0281) 894896
PURBALINGGA 53319

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2020**

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. IMAM HADI, MSi

NIP. 19650401 1986073 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah kepada segenap aparaturnya DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga, sehingga dapat menyusun ulang dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020.

Renja Tahun 2020 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen perencanaan umum program pembangunan untuk kurun waktu satu tahun kedepan diseluruh wilayah Kabupaten Purbalingga yang penyusunannya berdasarkan/mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021 Kabupaten Purbalingga dan Renstra DINRUMKIM tahun 2016 – 2021 ini berisi uraian gambaran umum hasil evaluasi dan capaian Renja satu tahun sebelumnya permasalahan dan kondisi aktual yang dihadapi, tujuan, sasaran, strategi kebijaksanaan yang diambil, serta program – program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun ke depan pembangunan bidang perumahan dan permukiman.

Dokumen Renja 2020 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu jajaran DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga dengan rasa terbuka menerima saran, kritik yang membangun demi penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Semoga dokumen Renja Tahun 2020 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga ini dapat membantu dan menjadi acuan jajaran aparaturnya DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan kegiatannya dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Purbalingga,

2019

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

Drs. IMAM HADI, MSi

NIP.19650401 1986073 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Penyusunan Rencana Kerja.....	2
3. Sistematika Penulisan.....	3
II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	5
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dae.....	12
rah	
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	13
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	14
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	15
1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional	15
2. Tujuan dan Sasaran	15
3. Strategi dan Kebijakan.....	18
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	19
V. PENUTUP	21
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan pada Dinas Perumahan dan Permukiman (DINRUMKIM) sebagai bagian integral dari pembangunan bidang – bidang lainnya di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, mandiri, berdaya saing dan berakhlak mulia.

Penyusunan RENJA 2020 sebagai dasar rencana kerja dan kegiatan pada tahun 2020 mempertimbangkan segenap kekuatan dan peluang serta kelemahan yang ada pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga, dengan mengacu pada Visi Kabupaten Purbalingga yaitu **PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA**, sedangkan Misi yang terkait dengan OPD DINRUMKIM yaitu :

Misi 1 yaitu, *Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.*

Misi 3 yaitu, *Mengupayakan Ketercukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak.*

Misi 6 yaitu, *Mewujudkan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan yang Sehat dan Menarik untuk Melaksanakan Kegiatan Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui Gerakan Masyarakat, yang Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur / Sarana Prasarana Wilayah yang Memadai.*

Sedangkan Visi dan Misi SKPD DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga adalah :

a. VISI

Visi DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga dalam mendukung program pembangunan pemerintah kabupaten, yaitu :

**TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN
BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG MANTAP
DAN TERPERCAYA**

b. MISI

RENJA Tahun 2020 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga telah menetapkan misi untuk mewujudkan VISI DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut :

- b1. Mewujudkan pelaksanaan tugas DINRUMKIM yang profesional, efisien, efektif dan akuntabel, transparan, aspiratif, serta berkelanjutan dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
- b2. Mewujudkan kondisi sarana dan prasarana pelayanan lingkungan perumahan maupun pemukiman yang aman, mantap dan layak sesuai dengan tata ruang dan tata bangunan yang serasi, tertib, sehat dan aman di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan.
- b3. Mewujudkan ketersediaan air bersih sanitasi lingkungan bagi masyarakat.
- b4. Mewujudkan fasilitasi penyelenggaraan, pengadaan, pengembangan dan pengendalian pengelolaan pemanfaatan tanah milik Pemkab dan masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang.

2. Landasan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Landasan penyusunan RENJA 2020 adalah :

- a) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008;
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 1 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga ;
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga ;
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga (RPJMD);
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- i) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga

3. Sistematika Penulisan

RENJA 2020 ini disusun dengan sistematika:

I. PENDAHULUAN.

- a. Latar Belakang
- b. Landasan Penyusunan Rencana Kerja
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Sistematika Penulisan

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- b. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- d. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- b. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- c. Program dan Kegiatan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V. PENUTUP

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan penataan organisasi perangkat daerah yang baru sesuai Perda Kabupaten Purbalingga nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan dan Permukiman merupakan OPD baru yang sebagian tugas pokok, fungsi, program dan kegiatannya merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pencapaian Kinerja kegiatan Tahun Anggaran 2018 sebagai tahun pertama OPD Dinas perumahan dan Permukiman melaksanakan tugas dan fungsinya melalui program dan kegiatan sebagaimana yang ada dalam Dokumen APBD 2018

Uraian pencapaian kinerja tahun 2018 pada dokumen Renja 2018 dapat diuraikan secara garis besar sebagai berikut :

TABEL CAPAIAN KINERJA SASARAN 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2018	Capaian Kinerja 2018	Satuan
1	Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	100	97,54	Persen
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	*Persentase rumah layak huni *jml RTLH yg direhab	92,93 2.190	93,74 3.617	Persen Rumah
3	Meningkatnya akses aman air minum yang berkelanjutan	*Persentase kepemilikan rumah	80,57	81,85	Persen
4	Meningkatnya akses air limbah domestik / RT	*Persentase rumah tangga meng akses air bersih	90	90,43	Persen
5	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	*Persentase rumah tangga terlayani sistem air limbah	84	87,48	Persen
	Meningkatnya kepastian status & pemanfaatan tana	*Luasan kawasan kumuh perkotaan	0 ha	0 ha	Ha
		*Persentase tanah Pemda bersertifikat	63,48	63,81	Persen Bid

Indikator kinerja meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dari 6 paket kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, dari target yang ditetapkan 100 %, capaian kinerja kegiatan yang mendukung sasaran rata-rata mencapai 97,54 %. Hal ini karena adanya penerapan prioritas dalam belanja kegiatan yang mengacu pada efisiensi penggunaan anggaran yang disediakan. Sebagai contoh anggaran pemeliharaan kendaraan bermotor tidak dibelanjakan seluruhnya tapi mendasarkan pada skala prioritas kondisi suku cadang kendaraan. Jika kondisinya masih baik maka belum prioritas untuk dilakukan penggantian.

Indikator kinerja Persentase rumah layak huni, capaian kinerja tahun 2016 presentase RLH adalah 87,78 % (216.566 rumah) dan persentase RTLH sebesar 10,22 % (24.653 rumah). Pada tahun 2017 persentase rumah layak huni (RLH) capaian kinerjanya melebihi target 90 % yaitu tercapai 92,14 % (223.168 rumah) dan persentase jumlah RTLH menjadi 7,86 % (19.050 rumah).

Pada tahun 2018 persentase rumah layak huni dengan target 92,93 % (RLH) capaian kinerjanya tercapai 93,74 % (231.227 rumah) dan persentase jumlah RTLH menjadi 6,26 % (15.433 rumah).

Pencapaian ini disebabkan jumlah rumah tidak layak huni yang direhab mencapai 1.518 rumah dari APBD Kab, dan penambahannya adalah kontribusi dari kegiatan rehab RTLH yang didanai dari APBD Propinsi sejumlah 672, Dana Desa 1.414 dan Dana CSR 13 rumah.

Indikator kinerja persentase kepemilikan rumah pada tahun 2016 persentase kepemilikan rumah sebesar 80,62 % (241.219 rumah) sedangkan tahun 2017 persentase kepemilikan rumah tercapai 80,97 % (242.219 rumah) dari tambahan rumah swadaya 500 dan rumah formal 500. Pada tahun 2018 persentase kepemilikan rumah menjadi 81,93 % (246.669 rumah) Kenaikan capaian kepemilikan rumah sangat bergantung pada kemampuan ekonomi masyarakat untuk membangun/memiliki rumah.

Indikator kinerja Persentase rumah tangga meng akses air bersih dari target 90 % dapat dicapai 90,43 %, capaian ini dapat dicapai lebih besar lagi namun karena adanya keterbatasan anggaran yang dialokasikan pada kegiatan yang menunjang pencapaian target dan pembangunan prasarana air bersih Kutabawa (dari dana Ban Gub) yang dikerjakan tahun 2018 ini belum fungsional namun baru sampai pembangunan jaringan pipa dari sumber mata air belum sampai sambungan rumah (rencananya dapat menyumbang \pm 300 SR)

Indikator kinerja meningkatnya cakupan penanganan prasarana sanitasi pada tahun 2017 dari target 85,50 % dapat dicapai 84,35 %, ada peningkatan capaian kinerja dibandingkan tahun 2016 (78,8 %). Rendahnya capaian ini karena pada tahun 2017 belum teralokasikan untuk pembangunan jaringan sistem air limbah domestik/rumah tangga, sehingga capaian tersebut merupakan kontribusi jambanisasi yang dikelola OPD terkait. Demikian pula pada tahun 2018 capaian kerjanya sebesar 87,48 % yang merupakan kontribusi dari OPD terkait.

Indikator kinerja cakupan luasan kawasan kumuh pada tahun 2018 dengan target penanganan 4,42 hektar dapat ditangani seluas 4,42 hektar, sehingga sisa luasan kumuh pada akhir 2018 adalah 0 hektar. Dengan demikian untuk tahun anggaran berikutnya adalah kegiatannya bukan dalam bentuk penanganan kawasan kumuh namun dititik beratkan pada upaya pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh.

Indikator kinerja persentase Tanah milik Pemda bersertifikat dapat diuraikan bahwa bidang tanah Pemda sejumlah 1.216 bidang pada tahun 2016 sebanyak 62,66 % atau 762 bidang sudah bersertifikat, yang belum bersertifikat sebanyak 454 bidang (71 bidang diajukan ke BPN untuk proses sertifikat). Sehingga sisa bidang tanah yang belum diproses untuk disertifikat sebanyak 383 bidang.

Pada Tahun Anggaran 2017 ada 5 bidang tanah Pemda yang bersertifikat yang merupakan proses pengajuan tahun sebelumnya, sehingga capaian bidang tanah Pemda yang bersertifikat menjadi 767 bidang atau 63,07 %.

Dari target 40 bidang tanah Pemda yang diproses tahun 2017 untuk disertifikat oleh BPN, baru dapat menyelesaikan pemberkasan dokumen bidang tanah Pemda dan diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebanyak 33 bidang untuk diproses lebih lanjut oleh BPN guna diterbitkan sertifikat. Sedangkan 7 berkas bidang tanah dinyatakan belum lengkap dan akan diajukan lagi pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 diterbitkan 9 bidang tanah Pemda yang bersertifikat sehingga capaian bidang tanah Pemda yang bersertifikat menjadi 776 bidang atau 63,81 % (target 2018 sebesar 63,48 %), sehingga ada peningkatan sebesar 0,74 %, atau capaian kerjanya sebesar 100,5 % dari target.

Selanjutnya mengenai capaian kinerja kegiatan tahun 2018 secara garis besar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN 2018 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KAB. PURBALINGGA					
NO.	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN
		AWAL	PERUBAHAN		
	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah				
1	Penyediaan bahan dan jasa perkantoran	254.000.000	266.215.000	100	Efisiensi anggaran
2	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	126.000.000	170.000.000	100	
3	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	219.716.000	276.250.000	85,26	Efisiensi anggaran
4	Pengadaan sarana dan prasaran kantor	217.000.000	533.108.000	100	
5	Pendidikan dan pelatihan pegawai	20.000.000	5.000.000	100	
NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
6	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	10.000.000	6.420.000	100	

Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas perumahan					
1	Pemugaran Rumah Tidak Layah Huni	745.000.000	725.300.000	100	
2	Verifikasi dan validasi data RTLH (Pendataan perumahan Swada-ya / RTLH)	100.000.000	152.500.000	100	
3	Pembangunan sarprasdan utilitas perumahan formal	600.000.000	600.000.000	100	
4	Pengelolaan PSU perumahan formal	50.000.000	26.011.000	100	
5	Penunjang pembangunan Rusunawa	300.000.000	300.000.000	100	
6	Monev bidang Perumahan	30.000.000	30.000.000	100	
7	Verifikasi dan validasi data perumahan formal		45.000.000	100	
8	Listrik desa (Desa terang)	1.000.000.000	1.000.000.000	100	
Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas permukiman					
1	Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)	100.000.000	96.000.000	100	
2	Fasilitas Purbalingga Gayeng	1.410.500.000	1 363.250.000	100	
3	Pembangunan sarpras permukiman	260.000.000	565.000.000	100	
4	Monev bidang Permukiman	30.000.000	60.000.000	100	
5	Pembangunan bronjong pengaman permukiman.	195.000.000	195.000.000	100	
6	Fasilitas Pamsimas	75.000.000	63.000.000	100	
7	Penyelesaian keg. Pembangunan air bersih Kutabawa (luncuran)	183.120.000	183.120.000	100	
NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
8	Pengadaan prasarana air bersih Kutabawa (lanjutan) BanGub		2.618.790.000	100	

	9	Pendataan Sistem Air Minum Pedesaan (SIPAS) DAK	7.532.034.000	7.548.034.000	100	
D	Program Catur Tertib Pertanahan					
	1	Pensertifikatan Tanah-tanah Pemda dan Masyarakat.	553.100.000	372.980.000	63,81	
	2	Pengadaan tanah untuk pembangunan	11.688.571.000	20.305.975.000	61,54	
	3	Penataan dan pemanfaatan tanah	300.000.000	432.000.000	100	
	4	Penertiban permasalahan pertanahan	40.000.000	40.000.000	100	
	Total anggaran		26.899.200.000	37.897.602.000		

Dari tabel tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dan capaian kinerjanya hingga rata-rata lebih dari 90 %. Kecuali kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan yang hanya 61,54 %. Hal ini karena pengadaan tanah untuk pembangunan terkait faktor eksternal yang besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pengadaan tanah yaitu besaran harga yang ditetapkan oleh Appraisal jauh dibawah harga yang diinginkan oleh para pemilik tanah yang terdampak. Tindak lanjut ke depan adalah bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan tidak dibarengkan dengan kegiatan pembangunan fisiknya, karena proses pengadaan tanah membutuhkan waktu yang panjang untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

Kegiatan Purbalingga gayeng (100%), realisasinya berdasarkan persetujuan Bupati atas proposal yang diajukan oleh warga masyarakat yang membutuhkan bantuan material bangunan.

Kemudian kegiatan pensertifikatan tanah Pemda (63,81 %), realisasi kegiatan ini adalah berupa berkas dokumen (lengkap) tanah Pemda yang diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk diproses lebih lanjut guna diterbitkan sertifikatnya. Jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN adalah berdasarkan kemampuan kinerja BPN dan di luar

kewenangan OPD. Tahun anggaran 2018 dapat diterbitkan 9 sertifikat bidang tanah

2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja kunci dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator kinerja meningkatnya penyelenggaraan kelembagaan perangkat daerah, dari 6 paket kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, capaian kinerja kegiatan rata-rata mencapai 97,5 %. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan perangkat daerah baik untuk kepentingan internal OPD maupun eksternal OPD dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dapat terselenggara dengan baik.

Capaian kinerja bidang tanah Pemda yang bersertifikat ada kenaikan menjadi 776 bidang atau 63,81 %, kinerja pelayanan ini melebihi mencapai target 63,48 %.

Capaian kinerja pelayanan meningkatnya persentase Rumah Layak Huni pada tahun 2018 melebihi target 92,93 % yaitu tercapai 93,74 % (231.227 rumah) dan persentase jumlah RTLH menurun menjadi 6,26 %.

Capaian kinerja pelayanan meningkatnya persentase kepemilikan rumah pada tahun 2018 persentase kepemilikan rumah 81,93 % (246.669 rumah). Kenaikan capaian kepemilikan rumah sangat bergantung pada kemampuan ekonomi masyarakat untuk membangun/memiliki rumah.

Capaian kinerja pelayanan meningkatnya persentase rumah tangga mengakses air bersih tahun 2018 dari target 90 % dapat dicapai 90,43 %. Hal ini karena adanya keterbatasan anggaran yang dialokasikan pada kegiatan yang menunjang pencapaian target. Disisi lain anggaran yang telah dialokasikan untuk pembangunan prasarana air bersih

Kutabawa (dari dana Ban Gub) terjadi putus kontrak dan kegiatannya baru mencapai 76 % sehingga belum fungsional.

Capaian kinerja pelayanan meningkatnya cakupan penanganan prasarana sanitasi pada tahun 2018 dari target 85 % dapat dicapai 87,48 %, capaian tersebut kontribusi kegiatan untuk jambanisasi yang dikelola OPD terkait.

Capaian kinerja pelayanan meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman yaitu cakupan luasan kawasan kumuh yang ditangani dengan target penanganan 4,42 hektar dapat ditangani seluas 4,42 hektar, sehingga sisa luasan kumuh pada akhir 2018 menjadi 0 hektar.

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Prioritas pembangunan dalam lingkup Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga mengacu pada isu strategis dalam perencanaan pembangunan tahun 2018 yaitu :

- Masih adanya rumah tangga yang belum terakses air bersih dan sistem sanitasi dan masih adanya sebagian kawasan kumuh di perkotaan. Berdasarkan kondisi tersebut maka masih perlu adanya program/kegiatan yang mendukung pada peningkatan penyediaan prasarana permukiman untuk meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman dan mengurangi permukiman kumuh.

Dari hasil pelaksanaan anggaran tahun yang lalu masih kurangnya dukungan anggaran guna mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga untuk tahun berikutnya perlu adanya akselerasi dukungan anggaran guna mencapai target.

- Masih adanya masyarakat yang membutuhkan perhatian dalam rangka memenuhi ketersediaan rumah yang layak huni, sehingga masih diperlukan adanya kepedulian pemerintah daerah guna mewujudkan peningkatan kualitas perumahan bagi masyarakat

miskin melalui fasilitasi kegiatan untuk mengurangi rumah tidak layak huni. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya ternyata masih adanya RTLH yang belum masuk dalam database pemugaran RTLH.

Disisi lain adanya program pemerintah Pusat dan Propinsi serta lembaga-lembaga lain termasuk CSR dari perusahaan adalah merupakan peluang yang baik guna mendukung pencapaian menurunkan rumah tidak layak huni (RTLH)

- Perlunya optimalisasi penataan dan pemeliharaan kawasan perkotaan serta peningkatan kualitas prasarana ruang publik guna mengakomodasi dinamika pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan. Sehingga penataan dan pemanfaatan tanah Pemda perlu dikelola dengan baik melalui koordinasi dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait
- Masih adanya tanah Pemda yang belum bersertifikat, sehingga perlu adanya kegiatan yang mendukung pensertifikatan dan pengelolaan tanah Pemda guna terwujudnya kepastian status dan kepemilikan tanah Pemda sebagai aset yang perlu dilindungi dari sisi hukum.

4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Program / kegiatan yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah pada umumnya sudah terakomodir di dalam RKPD. Hanya besaran anggarannya yang kadangkala tidak sesuai dengan usulan awal karena adanya kebijakan pengalihan prioritas alokasi anggaran untuk kegiatan lainnya yang lebih mendesak atau lebih prioritas.

Disisi lain target capaian kinerja tidak dirubah dan atau tidak ada dukungan anggaran dan kegiatan untuk mencapai/memenuhi target kinerja, sehingga bisa mengakibatkan pada akhir tahun anggaran/pelaksanaan Renja target tidak tercapai.

Hal lain yang kadang terjadi adalah munculnya suatu kegiatan yang tidak diusulkan OPD, namun masih masuk dalam lingkup OPD, sehingga untuk jenis kegiatan yang sifatnya teknis diperlukan koordinasi yang simultan dengan pihak-pihak terkait, khususnya dalam penyusunan perencanaan teknis dan kondisi faktual di lapangan.

5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dalam penyusunan Renja Perangkat daerah adalah diperoleh melalui hasil kajian internal masing-masing Bidang yang dikaitkan dengan kesesuaian tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang melekat dan disinkronkan dengan dokumen RPJMD, program nasional dan propinsi.

Disisi lain juga menyerap aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui mekanisme Musrenbang secara berjenjang. Usulan ini selanjutnya disesuaikan dengan acuan yang ada di RPJMD dan kesesuaian dengan program pemerintah Pusat, Propinsi dan ketersediaan dana yang ada serta mempertimbangkan dari tingkatan prioritas pada skala kabupaten.

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. TUJUAN, SASARAN

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinrumkim antara lain adalah urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dimana kewenangannya yaitu dalam hal penyediaan perumahan bagi korban bencana, perbaikan kondisi kawasan permukiman, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Kinerja pembangunannya dapat dilihat dari indikator luasan kawasan kumuh, persentase rumah tidak layak huni, persentase rumah tangga bersanitasi, persentase rumah tangga menggunakan air bersih.

2. Tujuan

Tujuan pada Rencana Kerja Tahun 2020 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016–2021 adalah :

- a. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Meningkatnya perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas
- c. Terwujudnya legalitas dan tertib pemanfaatan tanah

Sedangkan penjabaran tujuan tersebut per Bidang/Sekretariat adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

* **Sekretariat :**

- Meningkatnya motivasi, etos kerja dan profesionalisme aparatur serta sarana dan prasarana operasional;
- Terwujudnya tertib administrasi perencanaan program dan pelaporan;
- Meningkatnya pelayanan dan pemasukan sumber-sumber pendapatan daerah dari SKPD/OPD.

* **Bidang Perumahan:**

- Meningkatnya sarana-prasarana perumahan yang sehat dan memadai bagi masyarakat;
- Meningkatnya kualitas pengelolaan perumahan formal dan swadaya sesuai dengan tata ruang di kawasan perkotaan, pedesaan dan kawasan strategis.

* **Bidang Permukiman:**

- Meningkatnya fasilitas sarana prasarana permukiman, sanitasi dan penyehatan lingkungan;
- Menurunnya wilayah permukiman masyarakat yang rawan bencana.

* **Bidang Pertanahan:**

- Meningkatkan pengelolaan, pengadaan dan pemanfaatan tanah milik Pemkab dan masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang;
- Meningkatnya jumlah asset tanah milik Pemkab yang bersertifikat

3. SASARAN

Saran Kinerja pada Rencana Kerja Tahun 2020 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016–2021 adalah :

1. Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah (mendukung misi 1)
2. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni, khususnya bagi keluarga miskin (mendukung Misi 3)
3. Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana lingkungan permukiman (mendukung Misi 6).
4. Meningkatnya kapasitas status dan pemanfaatan tanah.

Sedangkan penjabaran sasaran kinerja tersebut per Bidang/Sekretariat adalah sebagai berikut: :

* **Sekretariat :**

- Meningkatkan kinerja personil yang profesional dan berdedikasi tinggi serta tersedianya jumlah SDM bidang teknis serta sarana dan prasarana operasional yang memadai;
- Meningkatkan tertib administrasi perencanaan program / kegiatan, pelaporan kinerja kegiatan dan keuangan;
- Mengoptimalkan penjangkaran pendapatan daerah dari sumber-sumber pendapatan SKPD;

* **Bidang Perumahan :**

- Mewujudkan sarana dan prasarana dasar perumahan yang sehat dan memadai;
- Meningkatkan kualitas pengelolaan perumahan formal dan swadaya sesuai dengan tata ruang di kawasan perkotaan, pedesaan dan kawasan strategis.

* **Bidang Permukiman:**

- Mewujudkan tersedianya fasilitas sarana prasarana permukiman, sanitasi dan penyehatan lingkungan bagi masyarakat;

- Menurunkan wilayah permukiman masyarakat yang rawan bencana.

* **Bidang Pertanahan:**

- Meningkatnya pengelolaan, pengadaan dan pemanfaatan tanah milik Pemkab dan masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang;
- Meningkatnya jumlah asset tanah milik Pemkab yang bersertifikat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun strategi dan kebijakan dalam bentuk rumusan yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Purbalingga, yaitu :

Strategi meliputi:

- Peningkatan efisiensi dan efektifitas fungsi kelembagaan Perangkat Daerah
- Penyediaan rumah sehat sederhana dan rumah layak huni
- Pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan prasarana dan penataan kawasan permukiman
- Peningkatan akuntabilitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Kebijakan meliputi:

- Meningkatkan kapasitas kelembagaan perangkat daerah
- Memfasilitasi pengembangan perumahan dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin
- Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana permukiman
- Meningkatkan kualitas pengelolaan aset tanah milik Pemkab

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Untuk merealisasikan sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut di atas, DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga telah menyiapkan program dan kegiatan sebagai Rencana Kerja pada tahun 2020, sebagai berikut:

A. Program dan Kegiatan Pembangunan 2020 :

1. Program :

Sekretariat:

- Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
Program ini adalah sebagai fungsi penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD

Bidang Perumahan:

- Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
Program ini adalah untuk menunjang pencapaian visi misi kepala daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan serta ketersediaan kepemilikan rumah layak bagi masyarakat

Bidang Permukiman:

- Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Permukiman
Program ini untuk menunjang pencapaian program nasional di bidang teraksesnya air minum bagi masyarakat, teraksesnya sistem limbah domestik bagi rumah tangga dan teratasinya kawasan kumuh perkotaan

Bidang Pertanahan :

- Program Pengelolaan Pertanahan (Catur Tertib Pertanahan)
Program ini adalah untuk mewujudkan terwujudnya kapasitas status dan legalitas tanah milik Pemda.

2. Kegiatan

2. Kegiatan :

Rencana Kegiatan tahun 2020 disajikan pada Rencana Kerja dalam bentuk Matrik Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – OPD).

B. Pendanaan OPD :

Dalam tahun 2020 OPD DINRUMKIM Kab. Purbalingga dengan usulan rencana Pagu Anggaran Belanja Langsung dalam APBD 2020 sebesar Rp. 13.264.481.000,-

C. Matrik Renja 2020:

Rencana Kerja OPD tahun 2020 ini dituangkan dalam format Matrik Rencana Kerja OPD tahun 2020 yang disusun berdasarkan urutan prioritas pembangunan / bidang, sasaran , target 2020 program / kegiatan, serta jumlah anggaran.

Selanjutnya Matrik Rencana Kerja OPD tahun 2020 selengkapnya tertuang sebagaimana terlampir.

V. PENUTUP

Sebagaimana telah diuraikan di depan bahwa RENJA 2020 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen perencanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan pada Dinas Perumahan dan Permukiman yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Mengingat kondisi dan situasi yang berkembang serta keterbatasan kemampuan keuangan daerah, semoga apa yang telah dituangkan dalam RENJA 2020 ini dapat membantu mewujudkan kemajuan dan perkembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga sesuai dengan skala prioritas.

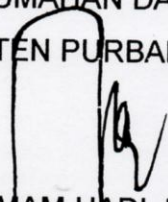
Kepada semua jajaran aparat DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga dan segenap lapisan masyarakat serta Unit Kerja / Instansi terkait yang berpartisipasi dalam mewujudkan RENJA 2020 ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya.

Terima kasih .

Purbalingga,

2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. IMAM HADI, MSi
Permbina Utama Muda
NIP. 19650104 198607 01 001

LAMPIRAN

KABUPATEN PURBALINGGA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUT PUT	OUT CAME	RENCANA USULAN PRIORITAS TAHUN 2020				KET
								LOKASI	TARGET	ANGGARAN (RP)		
										DAU	DAK	
1	PENDAPATAN											
2	ELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji)										700.000.000	
3	BELANJA LANGSUNG										2.798.626.000	
A	Menguatnya kelembagaan perangkat daerah	Tingkat efisiensi operasi-onal penyelenggaraan pemerintahan			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah						732.000.000	0
		Ketersediaan bahan dan jasa perkantoran	Paket	1	1 <i>Penyediaan bahan dan jasa perkantoran</i>	Tersedianya bahan dan jasa perkantoran	<i>Meningkatnya kelancaran</i>	Dinrumkim	1 paket	277.000.000		
		Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Paket	1	2 <i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi</i>	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	<i>Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas</i>	Dinrumkim	1 paket	160.000.000		
		Kualitas sarana dan prasarana kantor	Paket	1	3 <i>Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor</i>	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	<i>Meningkatnya kelancaran</i>	Dinrumkim	1 paket	265.000.000		
		Ketercukupan akan sarana prasarana kantor	Paket	1	4 <i>Pengadaan sarana dan prasarana kantor</i>	Tercukupinya sarana prasarana kantor	<i>Meningkatnya kelancaran</i>	Dinrumkim	1 paket	UP		
		Peningkatan kualitas SDM aparatur	Paket	1	5 <i>Pendidikan dan pelatihan pegawai</i>	Terdidik dan terlatihnya pegawai	<i>Meningkatnya kualitas aparatur</i>	Dinrumkim	1 paket	20.000.000		
		Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD	Paket	1	6 <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD</i>	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD	<i>Meningkatnya tertib administrasi perencanaan dan</i>	Dinrumkim	1 paket	10.000.000		
B	Meningkatnya kepastian status dan pemanfaatan	Persentase tanah Pemda bersertifikat	Persen		Program Tertib Catur Pertanahan						1.580.500.000	0
1		Meningkatnya tanah Pemda yang disertifikatkan			Kegiatan fasilitasi pensertifikatan tanah Pemda dan masyarakat :	Bidang Tanah Pemda yang tersertifikat	terwujudnya legalitas tanah				365.500.000	
					1 <i>Pensertifikatan Tanah-tanah Pemda dan Masyarakat.</i>			Kab. Pbg	1 paket	365.500.000		
2		Menurunnya permasalahan bidang tanah Pemda			Kegiatan Fasilitasi penertiban permasalahan pertanahan :	Bidang sengketa tanah Pemda yang terfasilitasi	Meningkanya legalitas tanah				25.000.000	
					1 <i>Fasilitasi Penertiban Permasalahan Pertanahan</i>			Kab. Pbg	1 paket	25.000.000		
3		Terfasilitasinya pengadaan tanah untuk kepentingan umum			Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum :	Terbelinya tanah untuk kepentingan umum	Terwujudnya pelaksanaan pembangunan untuk				800.000.000	
					1 <i>Fasilitasi Pengadaan tanah untuk pembangunan</i>			Kab. Pbg	1 paket	800.000.000		
4		Persentase tanah pemda yang dimanfaatkan			Kegiatan penataan dan pemanfaatan tanah :	Bidang tanah yang tertata dan termanfaatkan	Terwujudnya penataan dan pemanfaatan tanah				390.000.000	
		Meningkatnya tanah Pemda yang berpapan nama			1 <i>Pemasangan papan nama tanah Pemda</i>			Kab. Pbg	1 paket			
		Jml lelang dan pembayaran PBB ex. Bengkulu			2 <i>Fasilitasi lelang dan pembayaran PBB Tanah eks Bengkulu Kelurahan.</i>			Kab. Pbg	1 paket			
					3 <i>Pengelolaan Data Base Tanah-tanah Pemda.</i>			Kab. Pbg	1 paket			
					4 <i>Sistem informasi layanan pemanfaatan tanah Pemda</i>			Kab. Pbg	1 paket			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	O'JT PUT	OUT CAME	RENCANA USULAN PRIORITAS TAHUN 2020				KET		
								LOKASI	TARGET	ANGGARAN (RP)				
										DAU	DAK			
C	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	Persen		Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan						1.600.000.000	109.375.000		
	1	Menurunnya jumlah RTLH	Rumah		Kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni : 1. Fasilitas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni 2. Verifikasi dan Validasi RTLH	Terwujudnya RTLH yang direhab	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Kab. Pbg	1500 rmh					
	2	-Jumlah rumah tangga yg memiliki rumah			Kegiatan fasilitasi penyediaan perumahan formal : 1. Pemeliharaan PSU perumahan formal 2. Penunjang Sarpras Rusunawa 3. Pematangan Lahan usulan Rusunawa 4. Pendataan dan penilaian aset perumahan formal	Terfasilitasinya perumahan formal	Meningkatnya kualitas PSU	Kab. Pbg	5 paket		400.000.000			
	3	Menurunnya jumlah RTLH			Kegiatan fasilitasi perumahan swadaya : 1. Bantuan penunjang stimulan perumahan swadaya (BSPS) 2. Fasilitas Pemugaran RTLH (DAK) reguler 3. Fasilitas Pemugaran RTLH (DAK) 4. Fasilitas Pemugaran RTLH Bakeu Prop 5. Listrik desa (Desa terang) 6. Fasilitas Pemugaran RTLH (DAU)	Terfasilitasinya perumahan swadaya	Meningkatnya kualitas perumahan swadaya	Kab. Pbg			1.200.000.000			
4	Menurunnya jumlah RTLH			Penyediaan Perumahan Swadaya 1. Pemugaran RTLH (DAK) reguler 2. Pemugaran RTLH (DAK) penugasan 3. Pemugaran RTLH (BSPS)					200 SR 1500 rmh	50.000.000 400.000.000 750.000.000			109.375.000 109.375.000 up up	
						9.242.606.000			3000 RMH					
D	Meningkatnya akses aman air minum yang berkelanjutan	Persentase rumah tangga mengakses air bersih	Persen		Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Permukiman						2.230.866.000	7.011.740.000		
	1	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur	Luasan kawasan kumuh perkotaan	Ha	Kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh : 1. Kota Tanpa Kumuh)	Kawasan permukiman kumuh tertangani	Menurunnya kawasan	Kab. Pbg	1 paket		200.000.000 200.000.000			
	2	Kualitas PSU Permukiman			Kegiatan pemeliharaan prasarana sarana dan utilitas permukiman : 1. Fasilitas Purbalingga Gayeng 2. Pemeliharaan draenase Jl. Remujung Kel. Kalikabong 3. Pemeliharaan draenase lingkungan Kel. Purbalingga Kidul	Prasarana sarana dan utilitas permukiman terpelihara	Meningkatnya kualitas prasarana sarana utilitas	Kab. Pbg	1 paket		1.130.866.000			
								Kec. Klmn	1 paket		up			
								Kec. Pbg	1 paket		up			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUT PUT	OUT CAME	LOKASI	TARGET	ANGGARAN (RP)		KEY	
										DAU	DAK		
3		Ketersediaan PSU Perumahan yg representatif			4 Monev Bidang Permukiman	Terbangunnya prasarana sarana dan utilitas permukiman	Tersedianya fasilitas prasarana sarana dan utilitas	Kab. Pbg	1 paket	up	0		
					Kec. Pbg			1 paket	UP				
					Kec. Klgdg			1 paket	UP				
					Kec. Pbg			1 paket	UP				
					Kec. Pbg			1 paket	UP				
					Kec. Pbg			1 paket	UP				
					Kec. Klandana Pbg Kdui			1 paket	UP				
					Kec. Krtndara			1 paket	UP				
4		Persentase rumah tangga mengakses air bersih dan sanitasi			Kegiatan penyediaan air minum :	Tersedianya air minum dan penye-hatan lingkungan bagi masyarakat	Tercukupinya cakupan kebutuhan air minum dan sanitasi masyarakat				900.000.000	7.011.740.000	
					1 Pembangunan Sistem Penyediaan air minum desa Tunjungmuli			Kab. Pbg	1 paket	400.000.000			
					2 Pembangunan Sistem Penyediaan air minum di 5 lokasi			Kab. Pbg	1 paket	475.000.000			
					3 Pendapangan Sistem Penyediaan Air Minum			Kab. Pbg	1 paket	25.000.000			
					Kegiatan penyediaan air minum dan Penyehatan Lingkungan/Peningkatan SPAM (DAK Penugasan):			Kab. Pbg	27 paket	0	6.346.740.000		
					Pembangunan sistem air limbah domestik setempat			Kab. Pbg	3 paket	0	665.000.000		
JUMLAH								13.264.481.000		6.143.366.000	7.121.115.000		

Purbalingga, 4 Nop 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA

Des. IMAM HADI, MSI
NIP. 19650104 198607 1 001